

## REFERENSI

- Ahyaruddin, M., and R. Akbar. 2018. *Indonesian Local Government's Accountability and Performance: The Isomorphism Institutional Perspective*. Jurnal Akuntansi & Investasi (JAI), Vol.19 (1), 1-11
- Akbar, R. 2018. Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi & Akuntansi Publik, Vol. 1, No. 1, pp.1-16.
- Akbar, R., Pilcher, R. & Perrin, B., 2012. *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*. Pasific Accounting Review, Vol. 24(3), p. 262–291.
- Akbar, R., Pilcher, R.A. & Perrin, B., 2015. *Implementing Performance Measurement Systems: Local Government Under Pressure*. Qualitative Research in Accounting & Management (QRAM), Vol. 12(1), p. 3–33.
- Azis, M. I. 2020. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Ekonomika Volume XI Nomor 1. e-ISSN 2685-2977.
- Bryson, J.M., 2011. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. 4th ed., San Francisco: Jossey-Bass.
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed., California: SAGE Publication, Inc.
- DiMaggio, P.J. & Powell, W.W., 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. American Sociological Review, 48(2), pp.147–160.
- Friedman, M., 2005. *Trying Hard Is Not Good Enough: How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities*. Washington D.C: FSPI.
- Hambawata, C., 2018. Evaluasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Studi pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada. Diakses di [etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id/).

- Hood, Christopher. 1995. *The New Public Management in the 1980's: Variation on A Theme. Accounting, Organization and Society* Vol. 20, No 2/3, pp 93-109. 1995
- Hennink, M., Hutter, I. & Bailey, A., 2012. *Qualitative Research Methods*, Washington: SAGE Publication.
- Hughes, Owen E. 1994. *Public Management and Administration*. New York: St. Martin Press, Inc.
- Johari, R. J., Alam, M. M., & Said, J. 2018. *Assesment of Management Commitment in Malaysian Public Sector*. *Cogent Business & Management*, 5(1), 1469955. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1469955>.
- Kravchuk, R.S, and Schack, R.W, 1996. *Designing Effective Performance-Measurement Systems under the Government Performance and Results Act of 1993*. *Public Administration Review*, 56(4), 348-358.
- Kurniawan, F., 2017. *Evaluasi Penerapan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara Bandung 1)*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada.
- LAN dan BPKP. 2000. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN dan BPKP.
- Kurniawan, F., & Akbar, R. 2018. *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I)*. *Accounting and Business Informative System Journal*, ISSN: 2302-1500 (online). Vol. 6, No. 1.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. 2011. *Penguukran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Matthews, Joseph R. 2011. *Assesing Organizational Effectiveness: The Role of Performance Measures*. *Library Quarterly*, Vol. 81, No. 1, The University of Chicago.

- Moon, M. Jae. 2000. *Organizational Commitment Revisited in New Public Management: Motivation, Organizational Culture, Sector, and Managerial Level*. Public Performance & Management Review, 24(2), 177–194.
- Poister, Theodore H. 2003. *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations*. San Francisco, CA: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Pratolo, S. 2001. “*Double Entry Book Keeping dan Accrual Basis Sebagai Pendukung Akuntabilitas Sektor Publik*”. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 2, No. 2, Juli 2001, hh. 105–114.
- Purwitasari, E. & Akbar, R., 2016. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Rumah Sakit (Studi Pada RSUD Kardinah Tegal). *Accounting and Business Information System Journal*. Vol. 4, No. 3.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 208/PMK.02/2019 tahun 2015 tentang tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

\_\_\_\_\_, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

\_\_\_\_\_, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

\_\_\_\_\_, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

\_\_\_\_\_, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

\_\_\_\_\_, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Pemerintah Kota Yogyakarta

\_\_\_\_\_, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemda

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Ruscitasari, Z., 2019. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, Vol. 16 No. 2.

- Sari, I.P., 2015. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sleman). Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Sihaloho, F.L. & Halim, A., 2005. Pengaruh Faktor-Faktor Rasional, Politik dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VIII, (September).
- Sofyani, H. dan Akbar, R., 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia*, Vol. 10, No. 2, Desember 2013.
- Sofyani, H. dan Akbar, R., 2015. Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Isomorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 19, No. 2, Desember 2015, hh. 153-173.
- Spekle, R. F., & Verbeeten, F. H. (2014). *The Use of Performance Measurement Systems in The Public Sector: Effects on Performance*. *Management Accounting Research*, 25(2), 131–146. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.07.004>.
- Syachbrani, W., and Akbar, R., 2020. *The Influence Factors of the Development of Performance Measurement Systems in Indonesia Central Government*. Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering & Operations Management Detroit, Michigan, USA, August 10-14.
- Taylor, Jeannette. 2006. *Performance Measurement in Australian and Hong Kong Government Departments*. *Public Performance & Management Review*, 29(3), 334–357.
- Tran, T. Y., & Nguyen, P. N. (2020). *The Impact of The Performance Measurement Systems on The Organizational Performance of The Public Sector in a Transition Economy: Is Public Accountability a Missing Link?* *Cogent Business & Management*, 7(1), 1792669. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1792669>.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/02/14/510/1031830/kinerja-pemkot-jogja-belum-optimal-ternyata-ini-penyebabnya>

<https://www.tagar.id/kecewa-kinerja-opd-pemkot-yogyakarta-masih-rendah>

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/lagi-pemprov-yogyakarta-raih-predikat-tertinggi-sakip-2019>

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/185-pemda-akan-terima-rapor-akuntabilitas>

<https://menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja/file/6267-laporan-kinerja-lakip-2019>